

SIARAN PERS

Untuk segera diterbitkan

Kerjasama yang Solid antara Pemerintah dan Sektor Swasta, Kunci Keberlanjutan SJSN

Inisiatif ini sejalan dengan komitmen IPMG untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia

JAKARTA, 19 Agustus 2014 – International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), organisasi nirlaba yang beranggotakan 24 perusahaan farmasi multinasional berbasis riset yang beroperasi di Indonesia, pada hari ini menyelenggarakan *Focus Group Discussion* yang berjudul “Masa Depan SJSN di Tangan Pemerintah Baru Periode 2014-2019”. Acara ini merupakan bagian dari komitmen IPMG untuk mendukung kemajuan serta memberikan masukan untuk perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Perlindungan sosial masih menjadi permasalahan nasional meskipun konstitusi negara ini menjanjikan akses jaminan sosial dan menekankan peran negara dalam menyediakan jaminan sosial yang bersifat semesta, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk kesehatan yang resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2014 lalu dan ditujukan untuk mereformasi sistem layanan kesehatan Indonesia belum mencapai hasil yang diinginkan. Saat ini, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh BPJS dimana tantangan-tantangan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintahan baru yang akan resmi dilantik pada bulan Oktober 2014. Kegagalan maupun kesuksesan reformasi kesehatan akan sangat bergantung pada peranan pemerintahan untuk mengimplementasikan azas utamanya.

Luthfi Mardiansyah selaku Ketua IPMG berpendapat bahwa, “Pemerintahan yang baru harus menjadikan kesehatan nasional sebagai prioritas dalam agenda program negara, sesuai dengan aspirasi yang terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat. Janji presiden terpilih untuk meningkatkan infrastruktur dasar termasuk kesehatan dalam kampanyenya merupakan janji politik kepada rakyat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, IPMG mendorong pemerintah yang baru untuk melanjutkan dan meningkatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai upaya untuk meningkatkan sistem kesehatan dan menghapuskan ketidaksetaraan dalam sektor kesehatan, serta menjamin akses layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia.”

Keberlangsungan SJSN sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah mendatang mengingat pentingnya program ini baik bagi masyarakat maupun bagi peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan di Indonesia. Cita-cita untuk meningkatkan pelayanan kualitas tinggi serta menerjemahkan prinsip-prinsip umum terkait dengan peranan pemerintah yang

sesuai menjadi tindakan yang nyata membutuhkan kerjasama dan upaya yang solid antar sektor publik dan swasta.

Diskusi ini menghadirkan para pakar yang ahli dalam bidangnya, antara lain Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM, Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan RI; Dr. Chazali H. Situmorang, Apt. M.Sc., Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); dr. Togar Siallagan, Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS; Dr. Umbu Marisi, Mantan Direktur Operasional PT Askes dan Dr. Rosa Ch. Ginting, Ketua Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI). Beberapa asosiasi layanan kesehatan seperti GP Farmasi, IDI, Persi, IAI, LKPP, ARSADA dan ARSSI juga turut hadir dalam acara ini.

"IPMG percaya bahwa beberapa kunci dari keberlangsungan program JKN bergantung pada beberapa faktor di antaranya dari segi pembiayaan, peran para *stakeholders* yang seimbang, serta kerja sama erat publik dan sektor swasta (*public-private partnership*). IPMG mendukung penuh upaya pemerintah untuk menerapkan sistem layanan kesehatan yang membawa dampak positif bagi kesehatan warga negara Indonesia serta keberlanjutan program ini." jelas Luthfi.

Selain itu, demi tercapainya tujuan dan efektifnya pelaksanaan program JKN, pengobatan pasien juga harus menjadi prioritas. Kurangnya kemampuan obat-obatan yang digunakan, dapat berdampak pada lamanya proses penyembuhan yang pada akhirnya mengakibatkan beban biaya yang makin tinggi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan keberlangsungan pembiayaan program ini dalam jangka panjang.

Di sela-sela diskusi media pada hari ini Luthfi menjelaskan bahwa, "Setiap pasien memiliki hak yang sama untuk sehat termasuk hak untuk mengakses obat-obatan yang efektif, berkualitas tinggi dan berkhasiat. Hal ini merupakan tanggung jawab para penyedia layanan kesehatan untuk menghormati hak para pasien tersebut dan mengenali kebutuhan pasien yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangatlah penting memastikan para pasien untuk dapat memiliki akses pengobatan yang sesuai dengan kebutuhannya."

Dr Chazali H. Situmorang, Apt. M.Sc., Ketua, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai salah satu narasumber pada acara diskusi ini menyoroti pentingnya BPJS dan Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi pelaksanaan SJSN dan mengupayakan adanya perbaikan mendasar sistem SJSN. "Transparansi, peningkatan layanan dan perbaikan yang bersifat substansial merupakan faktor penting peningkatan pelaksanaan dan keberlangsungan SJSN di masa depan."

Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengatakan bahwa pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang dicita-citakan oleh JKN."

Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM, Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian mengatakan bahwa meskipun pelaksanaan program masih belum sempurna, secara umum Kementerian Kesehatan optimis bahwa target pelaksanaan SJSN akan tercapai pada tahun 2019.

dr. Togar Siallagan, Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan mengatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan JKN, ada beberapa aspek kebijakan yang berkaitan dengan masa depan SJSN yang perlu dipastikan oleh pemerintahan mendatang, termasuk mekanisme teknis pelaksanaan program, jaminan bahwa tidak akan ada perubahan dalam implementasi kebijakan dari Sabang sampai Merauke, juga evaluasi serta jumlah dan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk program tersebut.

Mengenai harapan terhadap pemerintahan mendatang, dr. Togar Siallagan mengatakan bahwa BPJS Kesehatan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan SJSN. "Sebagai lembaga negara, BPJS akan memberikan masukan berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan. BPJS percaya bahwa pemimpin terpilih di pemerintahan mendatang akan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan. Bukan sembarang pelayanan kesehatan, namun pelayanan kesehatan yang berkualitas yang mampu meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan."

Tentang IPMG

IPMG adalah organisasi nirlaba yang beranggotakan 24 perusahaan farmasi multinasional berbasis riset yang beroperasi di Indonesia. IPMG secara resmi terbentuk pada bulan Agustus 2002. Anggota IPMG dan kantor pusat mereka secara terus-menerus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk dapat menghadirkan di Indonesia obat-obatan inovatif yang aman dan memenuhi standar kualitas internasional. Sejak 1999 anggota IPMG telah memperkenalkan lebih dari 250 obat-obatan baru untuk penyakit kanker, penyakit infeksi, penyakit jantung serta berbagai penyakit lainnya. Anggota IPMG kini memperkerjakan sekitar 10.000 karyawan untuk mendukung kegiatan operasional mereka di Indonesia. IPMG berupaya memberantas peredaran obat palsu melalui kampanye penyadaran masyarakat atas risiko bahaya obat palsu. IPMG adalah anggota aktif dari International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi:

Naomi Juliandary

Communications Manager

International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)

T: +62 21 769 7531

F: +62 21 769 7532

E: Naomi.Juliandary@ipmg-online.com

M: +62 856 933 20 156

Dewi Nuraini

Associate

Burson-Marsteller

T: +62 21 5296 3880 ext. 305

F: +62 21 5296 3881

M: +62 818 0225 4971

E: Dewi.Nuraini@bm.com